

IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN- KABUPATEN ANGGOTA LEMBAGA REGIONAL BARLINGMASCAKEB

Diah Setyorini Gunawan¹ dan Ratna Setyawati Gunawan¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto
Jalan HR. Boenyamin No. 708 Purwokerto 53115 Telp. (0281)635292 E-mail: diahs29@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan, Pertama, mengidentifikasi posisi ekonomi masing-masing kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB ditinjau dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita, Kedua, mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial, subsektor unggulan dan potensial dalam kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, Ketiga, Mengidentifikasi perbedaan struktur ekonomi kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, dan Keempat, Mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki posisi paling menguntungkan ditinjau dari tingkat aksesibilitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode tahun 1995-2002, yang terdiri dari produk domestik regional bruto (PDRB) termasuk migas berdasarkan harga konstan tahun 1993; jumlah total penduduk, data jarak antarkabupaten/kota; data jumlah wisatawan yang menginap di hotel, data jumlah perusahaan otobis dan jumlah kendaraannya, serta data jumlah hotel. Penelitian ini menggunakan analisis Tipologi Klassen, analisis model rasio pertumbuhan (MRP), analisis location quotient (LQ), analisis Indeks Divergensi Krugman, dan analisis Connectivity Quotient (CQ). Temuan dari penelitian yaitu Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.

Kata kunci: sektor utama, potensi sektor, sub sektor utama, potensi sub sektor, struktur ekonomi

Abstract: This study aims, first, identify the economic position of each district in terms of economic growth and Barlingmascakeb per capita income level. Second, identify the dominant different districts of the economic structure Barlingmascakeb. Third, Identify differences in the economic structure of the district members Barlingmascakeb. This study used the period 1995-2002, secondary data consisting of regional gross domestic product (GDP), including oil and gas on the basis of constant prices of 1993, Fourthly, identify the districts that have the most advantageous position in terms of levels of accessibility. This study uses secondary data for the period 1995-2002, which consists of gross regional domestic product (GRDP), including oil and gas based on constant prices of 1993, total population, distance inter district/city, number of tourists housed in hotels, the amount of bus company and the number of vehicles, number of hotel. This research uses Klassen typology analysis, growth models (MRP) analysis, the location quotient analysis (LQ), Divergence Index Krugman analysis, and connectivity analysis quotient data (CQ). The results of the study, Cilacap is included in the classification of fast forward and fast-growing. Purbalingga included in the classification of areas of rapid growth. District Banjarnegara, Banyumas and Kebumen district included in the classification of relatively left behind areas.

Keywords: basic sector, potential sector, basic sub sector, potential sub sector, economic structure

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, dimana penentuan kebijakan dan pertanggungjawaban pembiayaan maupun pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah menekankan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 108).

BARLINGMASCAKEB merupakan lembaga regional bagi upaya meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta memanfaatkan potensi daerah. BARLINGMASCAKEB beranggotakan lima kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Lembaga regional ini secara resmi dibentuk pada tanggal 28 Juni 2003 (barlingmascakeb.com, 2003).

Pembentukan manajemen wilayah (*regional management*) seperti BARLINGMASCAKEB merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama pembangunan. Konsep ini tidak hanya difokuskan pada satu sektor saja tetapi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah. Fokus manajemen wilayah adalah sinergi pembangunan antardaerah dengan memberdayakan potensi ekonominya (Efiawan, 2004: 3).

Dalam rangka pengembangan wilayah masing-masing kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, harus diidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten tersebut. Selain itu, harus diperhatikan pula keterkaitan antarkabupaten di wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB. Keterkaitan tersebut dilihat dari terdapat tidaknya perbedaan struktur ekonomi kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB dan juga dilihat dari aksesibilitas antarkabupaten dalam wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB.

Tujuan dari penelitian sebagai berikut, 1) Mengidentifikasi posisi ekonomi masing-masing kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB ditinjau dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita, 2) Mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial, subsektor unggulan dan potensial dalam kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, 3) Mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan struktur ekonomi kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, 4) Mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki posisi paling menguntungkan ditinjau dari tingkat aksesibilitas

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder dengan periode pengamatan tahun 1995-2002. Data-data tersebut meliputi data produk domestik regional bruto (PDRB) dengan migas berdasarkan harga konstan tahun 1993 menurut lapangan usaha, data jumlah penduduk, data jarak antarkabupaten/kota, data jumlah pasar dan jenis pasar, data jumlah wisatawan yang menginap di hotel, data jumlah perusahaan otobis dan jumlah kendaraannya, serta data jumlah hotel.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Tipologi Klassen, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis *Location Quotient* (LQ), analisis indeks divergensi regional Krugman, dan analisis *Connectivity Quotient* (CQ).

Analisis Tipologi Klassen

Untuk mengetahui posisi perekonomian masing-masing kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya digunakan analisis Tipologi Klassen. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tetapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal (Syafrizal, 1997: 27-38).

Tabel 1. Klasifikasi Kabupaten-kabupaten Menurut Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB Per kapita (y)	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Kabupaten Maju dan Tumbuh Cepat	Kabupaten Berkembang Cepat
$r_i < r$	Kabupaten Maju tetapi Tertekan	Kabupaten Relatif Tertinggal

Keterangan:

y_i adalah pendapatan per kapita rata-rata wilayah kabupaten i

y adalah pendapatan per kapita rata-rata provinsi

r_i adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata wilayah kabupaten i

r adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata provinsi

Deskripsi Kegiatan Ekonomi Unggul dan Potensial

1. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggul dan Potensial

Dalam mengidentifikasi sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, akan dilakukan *overlay* antara analisis MRP dengan analisis LQ.

a. Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial terutama struktur ekonomi wilayah kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik secara eksternal (provinsi) maupun internal (wilayah studi). Pendekatan analisis MRP dibagi menjadi dua, yaitu: (1) rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR), dan (2) rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS). RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing kegiatan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Apabila nilai RPR lebih besar dari 1 maka RPR dikatakan (+) dan apabila RPR lebih kecil dari 1 maka RPR dikatakan (-). Sedangkan RPS membandingkan pertumbuhan kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pertumbuhan kegiatan yang bersangkutan pada tingkat provinsi. Dari analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial pada tingkat wilayah kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, yang terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu.

1) *Klasifikasi 1*, yaitu nilai (+) dan (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol dan demikian pula pada tingkat wilayah kabupaten/kota.

2) *Klasifikasi 2*, yaitu nilai (+) dan (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol, namun pada tingkat wilayah kabupaten/kota belum menonjol.

3) *Klasifikasi 3*, yaitu nilai (-) dan (+) berarti kegiatan ekonomi tersebut pada tingkat provinsi pertumbuhannya tidak menonjol, akan tetapi pada tingkat wilayah kabupaten/kota pertumbuhan kegiatan tersebut menonjol. Dari sudut pandang wilayah kabupaten/kota, kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan potensial yang dapat dikembangkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

4) *Klasifikasi 4*, yaitu (-) dan (-) berarti kegiatan tersebut baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Model Rasio Pertumbuhan (Yusuf, 1999: 219-233)

a) Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi

$$(RP_R) = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

b) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_S)

$$= \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}$$

Keterangan:

ΔE_{ij} = Perubahan pendapatan kegiatan *i* di kabupaten pada periode *t* dan *t+n*.

ΔE_{iR} = Perubahan pendapatan kegiatan *i* di wilayah provinsi.

ΔE_R = Perubahan PDRB di wilayah provinsi.

E_{ij} = Pendapatan kegiatan *i* di kabupaten.

E_{iR} = Pendapatan kegiatan *i* di wilayah provinsi.

E_R = PDRB di wilayah provinsi.

b. Analisis *Location Quotient*

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Formulasi LQ menurut Bendavid-Val (1991: 74) sebagai berikut.

Formulasi LQ:

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n}$$

Keterangan:

X_r = PDRB sektor *i*/ subsektor *i* pada wilayah kabupaten

RV_r = Total PDRB kabupaten

X_n = PDRB sektor *i*/ subsektor *i* pada wilayah provinsi

RV_r = Total PDRB provinsi

Kriteria pengukuran LQ, yaitu apabila $LQ > 1$ berarti sektor/subsektor tersebut merupakan sektor/subsektor unggulan di kabupaten dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ berarti sektor/subsektor tersebut bukan merupakan sektor/subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ = 1$, berarti peranan

relatif dari sektor/subsektor tertentu di kabupaten sama dengan peranan relatif dari sektor/subsektor tertentu di tingkat provinsi.

2. Identifikasi Subsektor Ekonomi Unggul dan Potensial

Subsektor-subsektor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah subsektor-subsektor dari sektor-sektor ekonomi unggul dan sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ. Identifikasi subsektor ekonomi unggul dan subsektor ekonomi potensial dari sektor-sektor ekonomi unggul dan sektor-sektor ekonomi potensial menggunakan alat-alat analisis yang sama pada penentuan sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial.

3. Analisis Indeks Divergensi Regional Krugman

Untuk mengamati dan melakukan analisis antarkabupaten dalam wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB, digunakan indeks divergensi regional Krugman untuk menghitung perbedaan struktur ekonomi, dan karenanya spesialisasi regional. Krugman (dalam Kuncoro, 2002: 189-190) mendefinisikan indeks tersebut sebagai berikut.

$$SI_{jk} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{E_{ik}}{E_k} \right|$$

Keterangan:

E_{ij} = PDRB dalam sektor i untuk wilayah kabupaten j

E_j = Total PDRB untuk wilayah kabupaten j

E_{ik} = PDRB dalam sektor i untuk wilayah kabupaten k

E_k = Total PDRB untuk wilayah kabupaten k

$i = 1, \dots, n.$

Jika indeks sama dengan 0, maka kedua wilayah kabupaten tersebut mempunyai struktur ekonomi yang sama. Indeks akan sebesar dua jika kedua wilayah kabupaten tersebut terspesialisasi secara penuh.

4. Analisis *Connectivity Quotient*

Analisis CQ digunakan untuk mendeskripsikan akses antarkota dalam suatu wilayah. Perhitungan CQ dilakukan dengan cara sebagai berikut (Bendavid-Val, 1991: 160).

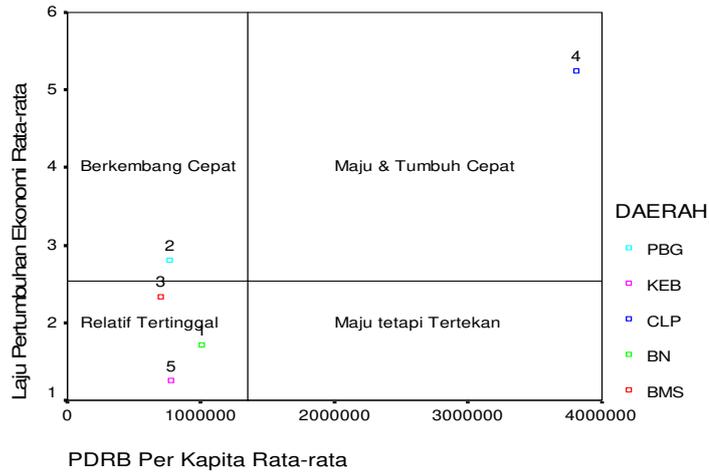
- Hitung jarak dari suatu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lainnya dalam suatu wilayah.
- Hitung total jarak untuk semua kota/kabupaten, kemudian bagi dengan jumlah kota/kabupaten untuk mendapatkan jarak rata-rata (*regional average*).
- Bagi total jarak dari setiap kota/kabupaten dengan *regional average* untuk mendapatkan nilai *connectivity quotient*.

Kriteria pengukuran *connectivity quotient*, yaitu apabila $CQ < 1$, berarti tingkat aksesibilitas suatu kota lebih tinggi. Dan sebaliknya, apabila $CQ > 1$, berarti tingkat aksesibilitas suatu kota lebih rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Anggota-anggota BARLINGMASCAKEB yang lain, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan



Keterangan: Data PDRB yang digunakan adalah data PDRB dengan migas

Gambar 1. Tipologi Klassen Kabupaten-kabupaten Anggota BARLINGMASCAKEB Periode 1995-2002

Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal. Hasil analisis Tipologi Klassen kabupaten-kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB disajikan pada *Gambar 1*.

Deskripsi Kegiatan Ekonomi Unggul dan Potensial

1. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggul dan Potensial

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ masing-masing kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB adalah sebagai berikut.

- a. Kabupaten Banjarnegara

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Banjarnegara disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Banjarnegara

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	Sektor Potensial Sektor pertanian serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	Sektor Unggul Sektor bangunan dan sektor jasa-jasa
	< 1	Sektor Tertinggal Sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran	Sektor Potensial Sektor industri pengolahan serta sektor pengangkutan dan komunikasi

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa

- 1) Sektor bangunan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Banjarnegara, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Sektor pertanian; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Banjarnegara.
- 3) Sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Banjarnegara.

b. Kabupaten Purbalingga

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Purbalingga disajikan pada *Tabel 3*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa.

- 1) Sektor jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang unggul di Kabupaten

Purbalingga, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.

- 2) Sektor pertanian; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Purbalingga.
- 3) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Purbalingga.

c. Kabupaten Banyumas

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Banyumas disajikan pada *Tabel 4*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa

- 1) Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Banyumas, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.

Tabel 3. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Purbalingga

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<u>Sektor Potensial</u> Sektor pertanian, sektor bangunan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi	<u>Sektor Unggul</u> Sektor jasa-jasa
	< 1	<u>Sektor Tertinggal</u> Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	<u>Sektor Potensial</u> Sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran

Tabel 4. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Banyumas

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<u>Sektor Potensial</u> Sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa	<u>Sektor Unggul</u> Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, dan air bersih
	< 1	<u>Sektor Tertinggal</u> Sektor perdagangan, hotel, dan restoran	<u>Sektor Potensial</u> Sektor industri pengolahan dan sektor bangunan

- 2) Sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa; sektor industri pengolahan; serta sektor bangunan merupakan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Banyumas.
- 3) Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Banyumas.

d. Kabupaten Cilacap

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Cilacap disajikan pada *Tabel 5*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa.

- 1) Sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Cilacap, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Cilacap.

Tabel 5. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Cilacap

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<u>Sektor Potensial</u> -	<u>Sektor Unggul</u> Sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran
	< 1	<u>Sektor Tertinggal</u> Sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	<u>Sektor Potensial</u> Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa

- 3) Sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Cilacap.

e. Kabupaten Kebumen

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Kebumen disajikan pada *Tabel 6*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa.

- 1) Tidak ada sektor ekonomi Kabupaten Kebumen yang mempunyai pertumbuhan yang menonjol sekaligus mempunyai kontribusi yang dominan.
- 2) Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa; sektor industri pengolahan; serta sektor bangunan merupakan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Kebumen.
- 3) Sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor eko-

nomi tertinggal di Kabupaten Kebumen.

2. Identifikasi Subsektor Ekonomi Unggul dan Potensial

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ masing-masing kabupaten anggota BAR-LINGMASCAKEB adalah sebagai berikut;

a. Kabupaten Banjarnegara

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Banjarnegara disajikan pada *Tabel 7*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa;

- 1) Subsektor tanaman perkebunan, subsektor pengangkutan, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi merupakan subsektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Banjarnegara, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perikanan, subsektor pemerintahan dan hankam, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga

Tabel 6. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Kebumen

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<u>Sektor Potensial</u> Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa	<u>Sektor Unggul</u> -
	< 1	<u>Sektor Tertinggal</u> Sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi	<u>Sektor Potensial</u> Sektor industri pengolahan dan sektor bangunan

Tabel 7. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Banjarnegara

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<p><u>Subsektor Potensial</u> Subsektor tanaman bahan makanan serta subsektor pemerintahan dan hankam</p>	<p><u>Subsektor Unggul</u> Subsektor tanaman perkebunan, subsektor pengangkutan, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi</p>
	< 1	<p><u>Subsektor Tertinggal</u> Subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor industri non migas, serta subsektor komunikasi</p>	<p><u>Subsektor Potensial</u> Subsektor perikanan, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga</p>

merupakan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Banjarnegara.

- 3) Subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor industri non migas, dan subsektor komunikasi merupakan subsektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Banjarnegara.

b. Kabupaten Purbalingga

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Purbalingga disajikan pada *Tabel 8*. Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa

- 1) Subsektor listrik, subsektor perdagangan, serta subsektor pemerintahan dan hankam merupakan subsektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Purbalingga, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor penggalian, subsektor air bersih, subsektor hotel dan restoran, subsektor subsektor pengangkutan, subsektor komunikasi, serta subsektor jasa swasta merupakan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 8. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Purbalingga

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<p><u>Subsektor Potensial</u> Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor hotel dan restoran, serta subsektor pengangkutan</p>	<p><u>Subsektor Unggul</u> Subsektor listrik, subsektor perdagangan, subsektor pemerintahan dan hankam</p>
	< 1	<p><u>Subsektor Tertinggal</u> Subsektor kehutanan dan subsektor industri non migas</p>	<p><u>Subsektor Potensial</u> Subsektor perikanan, subsektor penggalian, subsektor air bersih, subsektor komunikasi, dan subsektor jasa swasta</p>

- 3) Subsektor kehutanan dan subsektor industri non migas merupakan subsektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Purbalingga.

c. Kabupaten Banyumas

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Banyumas disajikan pada *Tabel 9*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa;

- 1) Subsektor perkebunan, subsektor penggalian, subsektor listrik, subsektor air bersih, dan subsektor sewa bangunan merupakan subsektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Banyumas, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, subsektor pengangkutan, subsektor komunikasi, subsektor bank, subsektor lembaga keuangan bukan

bank, subsektor jasa perusahaan, subsektor pemerintahan dan hankam, serta subsektor jasa swasta merupakan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Banyumas.

- 3) Subsektor industri non migas merupakan subsektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Banyumas.

d. Kabupaten Cilacap

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Cilacap disajikan pada *Tabel 10*.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa.

- 1) Subsektor perdagangan merupakan subsektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Cilacap, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, subsektor penggalian, subsektor industri migas, subsektor listrik, subsektor pengangkutan, subsektor

Tabel 9. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Banyumas

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<u>Subsektor Potensial</u> Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor pengangkutan, subsektor komunikasi, subsektor bank, subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor pemerintahan dan hankam, serta subsektor jasa swasta	<u>Subsektor Unggul</u> Subsektor perkebunan, subsektor penggalian, subsektor listrik, subsektor air bersih, dan subsektor sewa bangunan
	< 1	<u>Subsektor Tertinggal</u> Subsektor industri non migas	<u>Subsektor Potensial</u> Subsektor perikanan dan subsektor jasa perusahaan

Tabel 10. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Cilacap

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	<u>Subsektor Potensial</u> Subsektor kehutanan dan subsektor industri migas	<u>Subsektor Unggul</u> Subsektor Perdagangan
	< 1	<u>Subsektor Tertinggal</u> Subsektor perkebunan, subsektor industri non migas, subsektor air bersih, subsektor hotel, subsektor restoran, subsektor komunikasi, subsektor pemerintahan dan hankam, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi	<u>Subsektor Potensial</u> Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor penggalian, subsektor listrik, subsektor pengangkutan, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga

jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga merupakan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Cilacap.

- 3) Subsektor perkebunan, subsektor industri non migas, subsektor air bersih, subsektor hotel, subsektor restoran, subsektor komunikasi, subsektor pemerintahan dan hankam, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi merupakan subsektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Cilacap.

e. Kabupaten Kebumen

Hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ Kabupaten Kebumen disajikan pada Tabel 11.

Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui bahwa,

- 1) Subsektor sewa bangunan, subsektor pemerintahan dan hankam, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga merupakan subsektor ekonomi yang unggul di Kabupaten Kebumen, baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusi.
- 2) Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor penggalian, subsektor bank, subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor jasa perusahaan, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi merupakan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten Kebumen.
- 3) Subsektor perikanan dan subsektor industri non migas merupakan subsektor ekonomi tertinggal di Kabupaten Kebumen.

Tabel 11. Hasil *Overlay* antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Kebumen

		MRP	
		-	+
LQ	> 1	Subsektor Potensial Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor penggalian, subsektor bank, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi	Subsektor Unggul Subsektor sewa bangunan, subsektor pemerintahan dan hankam, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga
	< 1	Subsektor Tertinggal Subsektor perikanan dan subsektor industri non migas	Subsektor Potensial Subsektor lembaga keuangan bukan bank dan subsektor jasa perusahaan

3. Analisis Indeks Divergensi Regional Krugman

Untuk mengamati dan melakukan analisis antarkabupaten dalam wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB, digunakan indeks divergensi regional Krugman untuk menghitung perbedaan struktur ekonomi. Hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman disajikan pada *Tabel 12* dan *Tabel 13*.

Hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman pada tahun 1995 dan 2002 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar pada struktur ekonomi antara Kabupa-

ten Cilacap dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen yang mendekati satu dan lebih besar dari satu. Hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman pada tahun 1995 dan 2002 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen memiliki struktur ekonomi yang kurang lebih sama. Hal ini

Tabel 12. Perhitungan Indeks Divergensi Regional Krugman Tahun 1995

	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap	Kebumen
Banjarnegara		0.237	0.302	1.101	0.234
Purbalingga			0.336	1.076	0.298
Banyumas				0.987	0.395
Cilacap					1.159
Kebumen					

Keterangan: Diolah dari data PDRB dengan sembilan sektor ekonomi
Data PDRB merupakan data PDRB dengan migas

Tabel 13. Perhitungan Indeks Divergensi Regional Krugman Tahun 2002

	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap	Kebumen
Banjarnegara		0.263	0.337	1.029	0.274
Purbalingga			0.281	1.158	0.311
Banyumas				1.02	0.346
Cilacap					1.15
Kebumen					

Keterangan: Diolah dari data PDRB dengan sembilan sektor ekonomi
Data PDRB merupakan data PDRB dengan migas

dapat dilihat dari nilai indeks divergensi regional Krugman yang mendekati nol.

4. Analisis *Connectivity Quotient* (CQ)

Analisis CQ digunakan untuk mendeskripsikan akses antarkota dalam suatu wilayah. Hasil perhitungan analisis CQ disajikan pada Tabel 14.

Berdasarkan hasil analisis CQ, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki posisi yang menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai CQ Kabupaten Purbalingga adalah yang terendah. Berdasarkan hasil analisis CQ, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki posisi yang kurang menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai CQ Kabupaten Kebumen adalah yang tertinggi.

Tabel 14. Perhitungan *Connectivity Quotient* Wilayah Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB

Kabupaten	Nilai CQ	Peringkat
Banjarnegara	1,19	4
Purbalingga	0,69	1
Banyumas	0,74	2
Cilacap	1,03	3
Kebumen	1,34	5

Nilai CQ terkait dengan tingkat aksesibilitas. Berdasarkan analisis CQ, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap tergolong peringkat tiga besar, di mana nilai CQ kabupaten-kabupaten tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Terkait dengan kegiatan ekonomi suatu daerah, tingkat aksesibilitas yang tinggi menguntungkan daerah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, pada periode 1995-2002, dari lima kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB hanya Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Anggota-anggota BARLINGMASCAKEB yang lain, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.
2. Berdasarkan hasil *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB. *Tabel 15* menyajikan informasi sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB.
3. Berdasarkan identifikasi lebih lanjut terhadap sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial diperoleh informasi subsektor ekonomi unggul dan subsektor ekonomi potensial kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB. *Tabel 16* menyajikan informasi subsektor ekonomi unggul dan subsektor ekonomi potensial kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB.
4. Pada periode 1995 dan 2002, terdapat perbedaan yang besar pada struktur ekonomi antara Kabupaten Cilacap dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen memiliki struktur ekonomi yang kurang lebih sama.
5. Ditinjau dari tingkat aksesibilitas, Kabupaten Purbalingga memiliki posisi wilayah yang paling menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat aksesibilitas yang paling tinggi dalam wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB, diikuti oleh Kabupaten Banyumas yang menempati peringkat kedua dan Kabupaten Cilacap yang menempati peringkat ketiga. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen memiliki posisi wilayah yang kurang menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap.

Saran yang diajukan penulis berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pengembangan wilayah kabupaten-kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB harus diupayakan melalui strategi pembangunan yang tepat dengan memperhatikan potensi masing-masing kabupaten. Potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 15. Sektor Ekonomi Unggul dan Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten-kabupaten Anggota BARLINGMASCAKEB

Kabupaten	Sektor Ekonomi Unggul	Sektor Ekonomi Potensial
Banjarnegara	Sektor bangunan dan sektor jasa-jasa	Sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
Purbalingga	Sektor jasa-jasa	Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi
Banyumas	Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, dan air bersih	Sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa
Cilacap	Sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran	Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa
Kebumen	-	Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa

2. Sektor-sektor ekonomi potensial hendaknya dikembangkan sehingga di masa-masa yang akan datang sektor-sektor ekonomi tersebut dapat diandalkan menjadi sektor-sektor ekonomi unggul. Pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten.
 - b. membangun infrastruktur fisik yang menunjang pengembangan masing-masing sektor.

- c. mengundang para investor dan mengadakan kredit lunak dengan pengelolaan secara profesional. pelaku usaha di masing-masing sektor.
- d. mengadakan koordinasi antara pemerintah daerah dengan para

Tabel 16. Subsektor Ekonomi Unggul dan Subsektor Ekonomi Potensial Kabupaten-kabupaten Anggota BARLINGMASCAKEB

Kabupaten	Subsektor Ekonomi Unggul	Subsektor Ekonomi Potensial
Banjarnegara	Subsektor tanaman perkebunan, subsektor pengangkutan, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi	Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perikanan, subsektor pemerintahan dan hankam, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga
Purbalingga	Subsektor listrik, subsektor perdagangan, serta subsektor pemerintahan dan hankam	Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor penggalian, subsektor air bersih, subsektor hotel dan restoran, subsektor pengangkutan, subsektor komunikasi, serta subsektor jasa swasta
Banyumas	Subsektor tanaman perkebunan, subsektor penggalian, subsektor listrik, subsektor air bersih, dan subsektor sewa bangunan	Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, subsektor pengangkutan, subsektor komunikasi, subsektor bank, subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor jasa perusahaan, subsektor pemerintahan dan hankam, serta subsektor jasa swasta
Cilacap	Subsektor perdagangan	Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor penggalian, subsektor industri migas, subsektor listrik, subsektor pengangkutan, subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga
Kebumen	Subsektor sewa bangunan, subsektor pemerintahan dan hankam, subsektor jasa sosial kemasyarakatan, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga	Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor penggalian, subsektor bank, subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor jasa perusahaan, serta subsektor jasa hiburan dan rekreasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 1995-2002. *Pendapatan Regional Kabupaten Kebumen 1995-2002*. BPS, Kebumen.
- Badan Pusat Statistik. 1995-2002. *Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 1995-2002*. BPS Banjarnegara.
- Badan Pusat Statistik. 1995-2002. *Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 1995-2002*. BPS, Banyumas.
- Badan Pusat Statistik. 1995-2002. *Pendapatan Regional Kabupaten Cilacap 1995-2002*. BPS, Cilacap.
- Badan Pusat Statistik. 1995-2002. *Pendapatan Regional Kabupaten Purbalingga 1995-2002*. BPS, Purbalingga.
- Badan Pusat Statistik. 1995-2002. *Pendapatan Regional Provinsi Jawa Tengah 1995-2002*. BPS, Semarang.
- Barlingmascakeb. 2003. *Selayang Pandang BARLINGMASCAKEB*.
<http://www.barlingmascakeb.com>
accessed Dec 21, 2004.
- Bendavid-Val, A. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Fourth edition. New York: Praeger.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Industri*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat." *Prisma*, No. 03, Maret.
- Yusuf, M. 1999. "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota: Aplikasi Model Wilayah Bangka-Belitung". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XLVII, No. 2: 219-233.